

Memutus Kuasa Postkolonial di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Sejarah Kritis**Syahrul Kirom^{1*}**¹Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon; syahrulkirom1984@gmail.com*korrespondensi: syahrulkirom1984@gmail.com

Received: 7 September 2020; Accepted: 4 Oktober 2020; Published: 9 Oktober 2020

Abstract:

The history of the Indonesian people cannot be separated from its struggling past. The 350-year-resistance to Dutch colonialism is such a long struggle. The impact of the war with the Dutch has left us with a lot of 'colonial heritages', such as forced labor, slavery, a culture of corruption, and taxes. Taxes are a legacy of the Dutch cultural work mind. This paper used an approach called critical philosophy of history. The method implemented was descriptive-analytical. Physical occupation and warfare during the struggle for independence are no longer appropriate at this time. In the current era, colonialism has transformed into various patterns, in the form of policies, buying and selling of state assets, and foreign political economy that have an impact on poverty, unemployment, and the suffering of the Indonesian people, to name but a few. Thus, post-colonialism happening after the reformation era and in the millennial era requires special attention. Efforts to break the post-colonial chain of policy makers and Indonesian bureaucrats also need to learn from the history of the past to overcome national problems in the present time and to welcome a better future. There need to be efforts to build a very high awareness of policy makers, build a spirit of nationalism, love the motherland, appreciate state assets in order that they can be returned to the prosperity of all Indonesian people.

Keywords: *National History; Postcolonialism; Kebudayaan; Philosophy of History.***Abstrak:**

Sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari masa lalu yang penuh perjuangan. Perlawanan dengan kolonialisme selama 350 tahun itu waktu yang sangat lama sekali. Dampak peperangan dengan Belanda menyimpan banyak warisan kolonial dari kerja rodi, romusa dan pajak serta budaya korupsi pun muncul, pajak merupakan warisan pikiran kerja budaya belanda. Tulisan paper ini menggunakan pendekatan filsafat sejarah kritis. Metode yang digunakan adalah deskriptif- analitis. Penjajahan fisik dan peperangan pada saat merebut kemerdekaan sudah tidak tepat lagi dilakukan pada saat ini. Pada era sekarang ini kolonialisme ini bentuknya macam-macam ada melalui kebijakan kebijakan dan bahkan jual beli aset-aset negara dan politik ekonomi luar negeri yang berdampak pada kemiskinan dan pengangguran serta penderitaan rakyat Indonesia. Dengan demikian, postkolonial yang terjadi pasca reformasi dan di era millennial ini perlu mendapatka perhatian khusus, upaya memutus mata rantai postkolonial, para pemangku kebijakan dan para birokrat bangsa Indonesia ini juga perlu belajar dari sejarah (*history*) masa lalu untuk mengatasi persoalan kebangsaan pada masa kini dan untuk menatap masa depan yang lebih baik. Perlu ada upaya membangun kesadaran yang sangat tinggi pada pemangku kebijakan, membangun semangat nasionalisme mencintai ibu pertiwi, mencintai aset aset negara untuk dikembalikan pada kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: *Sejarah Nasional; Postcolonial; Kebudayaan; Filsafat Sejarah.*

1. Pendahuluan

Perjalanan sejarah Indonesia ini menyimpan pengalaman kelam di masa lalu, yakni penjajahan dan kolonisasi yang dilakukan oleh Belanda. Pada masa kolonialisasi itu masih membekas dalam hati dan bumi Indonesia, tak terlupakan keganasan dan penindasan serta perampokan orang-orang Belanda terhadap rakyat Indonesia.

Sejarah Nasional Indonesia mulai muncul karena Indonesia mulai dijajah oleh orang-orang Belanda, kesadaran itu ada ketika rakyat Indonesia telah diperlakukan secara mena-mena dan dipekerjakan secara rodi, tanpa menerima gaji sedikitpun dan bahkan tanah mereka disuruh membayar pajak kepada pihak asing. Kesadaran itu akhirnya membuat pikiran rakyat Indonesia untuk melakukan pemberontakan kepada pihak-pihak asing yang telah menindas rakyat Indonesia.

Tulisan ini akan berusaha membahas bagaimana penjajahan di era modern atau postkolonialisme dalam perspektif filsafat sejarah kritis. Penjajahan dalam model yang baru ternyata masih dirasakan oleh bangsa Indonesia sampai saat ini,. Hal itu terbukti masih adanya penguasaan asing yang intervensi terhadap kekayaan-kekayaan sumber daya alam yang berada di Indonesia dan lain-lain yang masih dikuasai oleh pihak luar negeri. Trend gaya baru penjajahan yang dilakukan oleh negara asing adalah dengan mengeruk kekayaan alam melalui pengendalian setiap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh negara Indonesia.

Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Kebangkitan Nasional 28 Oktober 1928 yang kita peringati setiap tahun, selalu kita dengung-dengunkan merupakan ritual-simbolik budaya, yang pada kenyataan tidak mampu membawa perubahan dan kemajuan bangsa Indonesia ke arah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bangsa dan negara Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang banyak sudah sepatutnya mampu melakukan kritik atas sejarah masa lalu yang ternyata tak jauh beda dengan masa saat sekarang ini.

2. Hasil Penelitian

2.1. *Praktek Kuasa Postkolonial di Indonesia*

Hari-Hari besar seperti Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan Hari Kebangkitan Nasional 28 Oktober 1928 yang kita peringati setiap tahun, sudah seharusnya bisa dijadikan salah satu langkah awal kita untuk keluar dari sebuah cengkeraman dan tekanan dari kolonialisme Belanda. Yang secara paksa telah mengeskplotasi kekayaan Tanah air Indonesia. Imperialisme secara fisik dan bersenjata yang dilakukan negara Barat membuat bangsa Indonesia harus melakukan gerakan perlawanan atas hegemoni Barat.

Sejarah kolonialisasi adalah sejarah perampasan. Kolonialisme merupakan sebuah bentuk kekuasaan yang sepertinya tak pernah memberikan anugerah, kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam diri manusia. Maka, sangat absah kiranya bila upaya dekolonisasi adalah seruan revolusi fisik berpanggung senjata dari kekuatan rakyat Indonesia. Sejarah kolonialisasi sangat melekat dengan orang-orang Belanda (Dutch) yang telah melakukan penjajahan atas Indonesia (Sartono Kartodirdjo, 2001:29). Itulah salah satu ciri penindasan yang dilakukan Belanda terhadap negara Indonesia.

Menurut Djoko Suryo, sistem kolonialisasi Belanda sejak abad ke-19 telah membawa dampak yang mendalam dalam proses disintegrasi dan diskontinuitas masyarakat tanah jajahan. Penetrasi politik melalui proses birokratisasi ternyata telah membawa kehancuran, disintegrasi dan kekuasaan penguasa lokal tradisional sehingga menyebabkan ketegangan, kekerasan dan konflik antara penguasa lokal dan penguasa barat.

Pada masa kekuasaan Belanda di Abad ke-19, mereka (kaum Belanda) juga melakukan penetrasi politik dan penetrasi ekonomi kapitalis dalam berbagai sistem di antaranya seperti sistem tanah pajak (*Landrente*), sistem tanam wajib (*Cultuurstelsel*) dan sistem perkebunan (*Onderneming*), sistem persewaan (*Verpactingen*) serta sistem monopoli komoditi, yakni meneruskan sistem VOC yang membawa kemerosotan perekonomian di Indonesia (Djoko Suryo, 2009:42).

Sementara itu, Frantz Fanon dalam *A Dying Colonialism* (1965: 89), mencoba membicarakan tentang kolonialisme, bahwa penjajahan Eropa dalam banyak hal telah memberikan amunisi kesadaran masyarakat dunia ketiga seperti Indonesia yang melakukan perlawanan atas pencaplokan dan hegemoni Barat atas tanah kekuasaan mereka. Kolonialisme telah meletakkan tangannya dibenua kita (Indonesia). Oleh karenanya, negara Indonesia harus segera memotong segala bentuk jajahan yang dilakukan orang-orang kolonialisme.

Semenjak orang-orang Eropa yang telah melakukan imperialisme dan kolonialisme terhadap seluruh jajahan yang ada di wilayah pelosok di daerah Indonesia. Sudah barang kali, jika kemudian visi dan misi yang dikonstruksi orang-orang kolonialisme, itu merupakan suatu tindakan kekerasan (imperialisme). Kolonialisme yang dilakukan orang kolonialisme cukup luas mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan bahkan agama.

Dalam konteks kolonial, realitas manusia ditimpakan lewat tajamnya ketegangan (*tension*) dalam kehidupan ekonomi dan politik. Menurut Ahmad Baso dalam *Islam Pasca-Kolonial : Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme* (2005;23), manusia dianggap secara kasat mata sebagai sebuah saringan fakta tentang perebutan "milik" dan "bukan milik" suatu bentuk penindasan terhadap ras tertentu.

Kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan Belanda terhadap seluruh rakyat Indonesia ini menimbulkan efek negatif, dan rakyat Indonesia merasa tidak menerima perlakuan para koloni yang begitu kasar dan jahat. Mereka yang tidak patuh terhadap peraturan orang-orang Belanda itu harus di bunuh, penindasan fisik dan senjata di zaman kolonial sangat dirasakan oleh orang-orang terdahulu, termasuk Soekarno, Bung Hatta, Moh. Yamin dan Pramodya Ananto Toer.

Kejahatan dan kekerasan yang dilakukan orang-orang kolonialisme dengan merampas tanah dan rempah-rempah milik rakyat Indonesia itu menunjukkan watak orang-orang Kolonialisme zaman dahulu tidak memiliki rasa kemanusiaan dan keadilan. Hati nurani mereka tumpul karena dibalut oleh kekuasaan dan ingin menguasai negara Indonesia. Itulah adalah salah satu sejarah kelam Indonesia yang dijajah oleh kolonialisme yang begitu lama sekali.

2.2. Munculnya Neoimperialisme dan Postkolonialisme

Setelah sistem kolonialisme berakhir pada abad ke 19, kini kita akan memulai lagi babak baru dalam pergulatan apa yang disebut oleh Richard King dengan diskursus postkolonial sebagai bentuk baru dari kolonialisme. Yakni bagaimana kolonialisme Eropa yang terus mengkonstruksi hubungan Barat dan Timur. Setelah negara-negara bekas koloni memperoleh kemerdekaan.

Dalam studi postkolonial yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa implikasi dari kolonialisasi jelas ini akan menggambarkan suatu perbedaan-perbedaan antara subjek dan objek, penjajah (*colonizer*) dan terjajah (*colonized*) secara luas. Dua hal tersebut yang harus kita ingat khususnya orang timur yakni Indonesia, apa yang digambarkan orang-orang kolonialisme adalah sebagai objek yang dijajah.

Ania Loomba, dalam karyanya *Colonialism/Postcolonialism* (1998;123), mengatakan bahwa postkolonialisme sendiri telah menggambarkan proses resistensi dan rekonstruksi yang terus berlanjut dilakukan oleh orang-orang Barat. Melainkan juga, mereka telah mengeksplorasi pelbagai bentuk pengalaman tentang penindasan, resistensi, ras, gender, representasi, perbedaan, pengusiran dan migrasi dalam hubungannya dengan dominasi Barat.

Proyek postkolonialisme ini sebenarnya dilakukan untuk menangani para kelompok anggota yang dikenal dengan *Subaltern Studies Collective*. Meminjam istilahnya Gayatri Chakravorty Spivak dalam *Mapping Studies and Postcolonial* (2002;50), bahwa subjek *subaltern* adalah subjek yang tertindas, teralinesikan dari sistem kelas yang dianggap kelas inferior. Bahwa apa yang dianggap *Subaltern* ini adalah kaum pinggiran yang selalu dijajah dan senantiasa secara letak geografis memang sangat dimungkinkan harus dijajah agar bisa orang-orang Barat seperti Belanda bisa mengeruk hasil kekayaan tanah mereka.

Namun, di sisi lain, gagasan Antonio Gramsci tentang hegemoni dan kelas *subaltern* (kelas paling bawah, rendah, terpinggirkan) memberikan rangsangan dan inspirasi yang kaya bagi studi

postkolonial tentang subjek yang terjajah. Ini bisa kita lihat dalam karyanya Richard King, *Orientalisme, and Religion, Postcolonialism Theory, India and "The Mystics East"* (1999:89), yakni tentang kemunculan mazdhab *Subaltren Studies* di India, yang dalam sejarahnya telah digolongkan sebagai kaum *subaltren*.

Perlu kita ketahui secara bersama bahwa ada dua perbedaan yang mendasar mengenai studi kolonialisme dan postkolonialisme. *Pertama*, pada level kolonialisme penguasaan Barat lebih menekankan pada kekerasan fisik serta menggunakan senjata dan penindasan dengan merampas segala kekayaan dijajah, yang berarti juga penguasaan teritorial, sosial, ekonomi dan politik

Kedua, dalam postkolonialisme sistem neoimperalisme Barat ini lebih tersusun secara halus namun pasti dan menyentuh segala aspek kehidupan umat manusia yakni melalui adanya kebijakan kapitalisme global yang mereka usung dan pengelompokan kaum *subaltern* yang tertindas, tapi juga pada penundukkan pikiran, kesadaran dan jiwa raga.

Dalam konteks, penjajahan yang terselubung itulah yang sesungguhnya harus diwaspadai oleh bangsa Indonesia dan bahkan para birokrat dan teknokrat yang duduk di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penjajah bisa dilakukan atas nama dan politis kebijakan yang sesungguhnya hanya berpihak kepada pihak-pihak tertentu, dan bukan berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.

Leela Gandhi dalam karyanya, *Postcolonial Theory : A Critical Introduction* (1998:45) tampak bahwa studi postkolonial mengambil sebuah inspirasi dari gagasan yang diusung oleh Edward W. Said dalam *Orientalisme* (1978:78), dengan melihatnya sebagai pembacaan (diskursif) yang mengikuti model dari analisis Michael Foucault, postkolonialisme dalam perspektifnya dianggap sebagai hubungan pengetahuan dan kuasa, yakni kehendak untuk mengetahui dunia Indonesia.

Sementara itu, menurut Joseph Nye, antara "kekuatan keras" (*hard power*), yaitu kemampuan untuk mengambil kebijakan dengan bertumpu pada kekuatan ekonomi dan militer dan kekuatan lunak' (*self power*), yaitu kemampuan suatu negara untuk menjadikan kekuatan negara semakin lemah (Samuel P Huntington, 2005: 145).

Berdasarkan asumsi tersebut, studi postkolonialisme sangat menarik sekali ketika kita tarik dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia. Kita lihat saja bagaimana kasus aset sumber daya alam yang dikuasai pihak luar negeri. Hal itu merupakan bagian dari salah satu perlakuan yang sangat eksploitatif atas kekuasaan Barat dalam melakukan penjajahan melalui kebijakan-kebijakan Barat yang sangat melemahkan sistem pemerintahan negara Indonesia. Orang-orang kulit hitam seolah-olah layak untuk dialienasikan karena memang dalam konteks studi ras, kelas, dan gender harus di tinds, apalagi dengan kekayaan tambang yang menghasilkan keuntungan bagi Barat melalui kekuatan (*power*) mereka berupaya mendehumanisasikan rakyat yang lain.

Begitu pula, perebutan tender pengelolaan aset sumber daya alam terkait minyak bumi dan batu bara dengan pihak luar dengan begitu sangat kentara sekali konstelasi ekonomi-politik yang dimainkan negara Barat. Sistem dan dominasi Barat Terhadap Timur seolah-olah mencerminkan bahwa segala tindakan Barat ini sangat mengiyakan dan konstruksi yang dilakukan Barat jelas tidak bisa dilepaskan dari sistem yang telah ada. Dalam konteks studi postkolonialisme kita mencoba mencari dan mengeksplorasi dominasi Barat atas Timur yang semakin meruntuhkan dunia peradaban dunia.

Menurut Samuel P Huntington, bahwa Barat memiliki banyak kekuatana dan kekuasaan untuk melakukan jajahan baru atau postkolonial baru, hal ini disebabkan Barat, memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, menguasai pasar modal internasional, mengendalikan peredaran mata uang, menguasai akses ke seluruh dunia, menguasai komunikasi internasional, dan mampu menetapkan moral *leadership* dalam berbagai negara (Samuel P Huntington, 2005 : 124).

Neoimperalisme yang dilakukan negara Barat ini jelas tidak bisa dilepaskan dari penguasaan konsepsinya tentang apa itu yang disebut Indoologi, Javanologi, Kleptonologi dan logi-logi lainnya. Yang kita sadari atau tidak, itu sangat memudahkan Barat melakukan koloni-koloni terhadap negara Indonesia.

Hal ini jelas tidak bisa dilepaskan dari gerakan-gerakan perlawanan terhadap postkolonialisme – meminjam istilahnya Homi Bhabha dalam *Colonial Discourse and Postcolonial Theory* (1993:134) yakni,

perlawanan terhadap kata Tuhan dan manusia. Maksudnya pertemuan antara penjajah dan yang dijajah. Ini yang disebut dengan *colonial encounter*. Perjumpaan dengan postkolonial pada akhirnya akan menjadi sebuah gesekan yang amat keras dan benturan peradaban dunia.

Oleh karena itu, kita perlu mengantisipasi dan mewaspadaikan sejak dini segala gerak-gerik serta langkah-langkah negara Barat atas orang Timur khususnya bangsa Indonesia. Melainkan juga, jiwa dan semangat kita untuk selalu bangkit, bangkit, dan bangkit terus dari segala macam bentuk penjajahan yang terselubung.

Karena itu, filsafat sejarah kritis mengajarkan pada kita tentang perbuatan manusia di masa lampau. Dari perbuatan-perbuatan tersebut kita dapat bercermin dan menilai, perbuatan mana yang merupakan keberhasilan dan kegagalan. Dengan demikian, berdasarkan pengetahuan itu, kita dapat lebih berhati-hati, agar kegagalan itu tak terulang kembali. Tepatlah kata Kon Futse, seorang filosof kenamaan yang berkata "sejarah mendidik kita supaya bertindak bijaksana" (C.S.T. Kansil dan Julianto, 1991:1)

Kehidupan manusia yang sekarang ini, merupakan mata rantai tak terpisahkan dari kehidupan manusia generasi sebelumnya dan generasi yang akan datang. Rangkaian "kelampauan-kekinian dan keakanan" itu merupakan suatu *continuity*. Karena itu mempelajari peristiwa-peristiwa masa lampau penting sekali bagi bangsa Indonesia saat ini. Dan mempelajari sejarah perjuangan nasional bangsanya merupakan keharusan untuk memilih dan menganalisa peristiwa-peristiwa sekarang untuk menentukan tindakan-tindakan pada masa yang akan datang.

2.3. Memperkuat Nasionalisme dan Identitas Bangsa Indonesia

Untuk mengatasi problem postkolonialisasi di era modern saat ini, yang seharusnya dilakukan oleh rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia adalah memupuk rasa nasionalisme dan membentuk identitas diri sebagai bagian dari kebudayaan nasional dari daerah satu dengan daerah lain. Menurut Sartono Kartodirjo nasionalisme adalah sebuah paham atau identitas diri yang digunakan untuk melegitimasi eksistensi bangsa Indonesia, melainkan juga, merajut rasa persatuan dan kesatuan dengan adanya legitimasi eksistensi negara Indonesia agar diakui oleh negara-negara luar negeri (Sartono Kartodirjo, 2005: 47).

Sementara itu, menurut Djoko Suryo, dalam sejarah pertumbuhan nasionalisme di Indonesia itu sesungguhnya digunakan untuk menggambarkan dan merajut proses dialog dan pergumulan antara kekuatan-kekuatan lokal dan supralokal dan nasional untuk mencapai suatu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia (Djoko Suryo, 2009:43).

Oleh karena itu, sudah seharusnya semangat nasionalisme itu merupakan kunci awal dalam upaya melakukan preventifisasi dari adanya praktek neoimperialisisme yang dilakukan oleh negara-negara luar yang mempunyai kepentingan terhadap aset-aset dan sumber daya alam di Indonesia.

Dengan demikian, sudah saatnya bila bangsa Indonesia ini perlu belajar kembali dari sejarah nasional Indonesia di masa lalu, agar sejarah di masa lalu tidak terulang kembali. Meski demikian, pada perjalanan sejarah Indonesia setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, toh seolah-olah Indonesia masih dijajah oleh bangsa yang lain. Kenyataan itu bisa penulis buktikan bahwa pihak-pihak luar mulai masuk di tanah Air dengan mengadakan setiap kebijakan pemerintah Indonesia, persoalannya kemudian adalah apakah kita sesungguhnya sudah benar-benar merdeka dari penjajahan?

Kemerdekaan secara ontologis, meminjam analisis Martin Heidegger kita sesungguhnya belum merdeka. Sebab apa, kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan yang tidak merata dan kemakmuran yang belum terpenuhi dan bahkan tingkat pendidikan yang belum maksimal diperoleh anak bangsa Indonesia itu menunjukkan bahwa kemerdekaan adalah hanya secara fisik yang kita nyatakan selama ini dengan makna kemerdekaan. Akan tetapi, kemerdekaan, dalam meraih segala-galanya dalam artian sumber daya alam yang kita punyai juga belum dirasakan sepenuhnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kolonialisisme menunjukkan gigi tajamnya di Indonesia saat ini dengan mengubah wajahnya yang agak halus, namun demikian, penjajahan di era modern kini lebih banyak dilakukan pihak di

luar negeri dalam bentuk yang lebih halus dengan selalu mengendalikan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan di Indonesia.

Dengan demikian, seiring dengan munculnya postkolonialisme di Indonesia. Rasa nasionalisme bangsa Indonesia ini perlu dipertanyakan kembali kepada seluruh rakyat Indonesia dan bahkan pejabat publik? Sebab apa, rasa nasionalisme kita saat ini mulai luntur dan pudar, sebab apa, banyak kekayaan-kekayaan alam seperti hutan, pulau-pulau dan tambang emas, minyak mentah dan sumber alam lainnya yang dijual ke pihak luar. Pertanyaan secara filosofis di manakah letak nasionalisme kita untuk mencintai tanah air?

Dalam konteks saat ini, kayaknya, benar apa yang dikatakan Ernest Gellner “*Nationalisme is primarily a political principle, which hold and national unit should be congruent*”, (Ross Poole, 1999:9) ternyata kata nasionalisme digunakan pada zaman Orde Baru hanya sebagai prinsip-prinsip politis belaka, nasionalisme yang kita pahami saati ini barulah sebuah impian, dan belum mencapai cita-cita menuju Identitas Indonesia sejatinya.

Rasa nasionalisme yang kita pahami saat ini bukanlah disebabkan bangkitnya kesadaran diri suatu bangsa; nasionalisme telah “*membikin-bikin*” bangsa-bangsa di mana mereka tidak ada. Nasionalisme menjadi jubah yang dianyam dari serat-serat kebohongan, maka ia pakai kata “*bikin*” dengan arti “*memalsukan*” daripada arti menciptakan serta penciptaan (Benedict Anderson, 2001:9).

Dengan begitu, kira membangun kesadaran kembali dan memaknai ulang kata nasionalisme itu perlu dipertegas. Kesadaran dan mental untuk mencintai tanah Air itu itu perlu ditanamkan juga oleh para pemimpin bangsa dan seluruh komponen masyarakat Indonesia, agar tanah-tanah air yang kita cintai ini tidak dikuras pihak asing dan bahkan para pemimpin bangsa juga tidak menjual kepada negara pihak.

Pada dasarnya, negara Indonesia sesungguhnya memiliki kekayaan yang begitu melimpah istilah jawa mengatakan *gemah ripah loh jinawi*, tapi, pada realitas dilapangan menunjukkan bahwa pengangguran, kelaparan dan kemiskinan masih menimpa bangsa Indonesia. Faktor kelaparan dan kemiskinan itu muncul disebabkan karena ada tanga-tangan asing yang masuk di dalam negeri Indonesia, praktek postkolonialisme dengan cara yang halus itu ternyata juga telah membuat rakyat Indonesia semakin menderita.

Karena itu, saat ini bangsa Indonesia adalah –apa yang dikatakan Benedict Anderson, bangsa Indonesia sebagai komunitas-komunitas yang terbayang-bayang saja dari negara Asing, di mana dalam konteks *nation*, Indonesia adalah sebagai objek, dan selama ini Indonesia tidak pernah menjadi subjek. Dengan begitu, kita dapat memahami ketika Indonesia objek, makna ini mengandung penegasan bahwa Indonesia adalah negara yang layak untuk dijajah dan ditindas dan bahkan dirampas sumber daya alamnya (Benedict Anderson, 2001:9). Oleh karena itu,, pemahaman terhadap *nation* dan nasionalisme itu perlu dijelaskan lagi secara komprehensif dan revitalisasi nasionalisme dan semangat membangsa harus ditumbuhkan dan ditancapkan kembali oleh seluruh rakyat Indonesia.

Nasionalisme adalah patologi sejarah pembangunan modern, tak bisa dielakkan sama seperti neurosis dalam sesosok pribadi, lengkap dengan kemampuan yang sudah ‘dari sononya’ untuk anjlok ke gilaan, berakar pada dilema-dilema ketidakberdayaan yang disorongkan ke hadapan sebagian besar jagat ini dan pada umumnya tidak mungkin disembuhkan (Benedict Anderson, 2001:7).

Meski saat Ini Indonesia tidak dijajah lagi oleh pihak luar, namun pada kenyataannya negara-negara kapitalis telah menghunjamkan kuku-kuku tajamnya pada jantung ke-ada-an subjek Indonesia. Melalui kesadaran geososial-politiknya mereka membangun instrumen-instrumen politik dan ekonomi sebagai bentuk penjajahan (Mudji Sutrisno, 2005 : V)

Subjek-subjek Indonesia begitu mudah kehilangan kesadaran pengetahuan tentang “aku Indonesia”. Aspek-aspek kearifan lokal akhirnya tersisih dari ruang wacana politik global, karena dianggap tidak sesuai dengan ruang politik global. Kini jelas bahwa sesungguhnya kita belum merdeka. Meminjam konsep Karl Jasper, kita hanya merdeka dalam arti “hidup” (*to live*), bukan

dalam arti “ada” (to (exist)). “Hidup” di sini bermakna pasif dan menjadi objek, sedangkan “eksis” bermakna aktif dan menjadi subjek (Mudji Sutrisno, 2005: VI).

Semangat nasionalisme harus dijadikan perumus tindak dan memiliki konsekuensi sangat serius-sepadan dengan kesungguhan mempertahankan darah dan tanah dalam “kekerabatan” dan tanah air- *sedhumuk bathuk senyari bumi, ditohi pati* dan mempertahankan agama. Sikap cinta tanah air dan membela bumi pertiwi yang diinjak-injak oleh pihak asing (Benedict Anderson, 2001:xxxvi)

Kelemahan itu disebabkan, bangsa Indonesia tidak memiliki rasa bersatu yang kuat lagi, karena mereka tidak memiliki kesadaran bahwa mempunyai tanah air yang satu, karena mereka miskin dan dibuat miskin oleh kolonialisme dan imperialisme, karena mereka tidak menghargai diri sebagai bangsa dan memang dibuat tetap merasa diri rendah, inlander. Oleh karena itu, mesti diperjuangkan kesadaran mengIndonesia yang kuat dan bersatu dahulu (Mudji Sutrisno, 2005:15).

3. Kesimpulan

Dalam konteks ini, untuk memutus mata rantai praktek kuasa neoimperialisme dan postkolonialisme di tanah air Indonesia ini, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatian. *Pertama*, dengan menumbuhkan semangat humanisasi dari para birokrat di dalam struktur pemerintahan pusat dan daerah. Humanisasi itu menunjukkan hal yang penting juga dalam mewujudkan kebudayaan nasional secara dalam upaya memutus mata rantai pihak asing yang sudah menduduki tanah air Indonesia. Rasa humanisasi terhadap sesama rakyat dan bangsa Indonesia ini harus ditumbuhkan, apabila para birokrat, teknokrat, dan pemerintah tidak mempunyai rasa humanisasi maka sudahlah habis keinginan negara Indonesia untuk memakmurkan dan mensejahterahkan rakyat Indonesia. Justru pihak luar akan semakin mudah untuk masuk-masuk di pos pos penting di dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan tujuan mengkonsolidasikan kepentingan pihak luar.

Kedua, dengan menumbuhkan kembali semangat nasionalisme dan mencintai ibu pertiwi, dalam hal ini mencintai tanah air secara fisik, yakni dengan mencintai hutan-hutan, pulau-pulau kita, kelapa sawit, batu bara, tambang emas, minyak tanah, mencintai budaya tradisional kita. Apabila rasa mencintai tanah air dengan segala tumpah darah bisa diimplementasikan dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemungkinan negara Indonesia akan lebih makmur dan sejahtera.

Melalui semangat nasionalisme dan mencintai tanah air yang tinggi serta tidak didasarkan pada perbedaan bahasa, kultural, atau posisi geografis, kita dapat mencapai persamaan untuk meraih kembali negara Indonesia tercinta. Semangat nasionalisme adalah perasaan satu nasib, satu perjuangan dalam kesengsaraan di bawah penindasan kolonialisme imperialisme.

Ketiga, diperlukan juga upaya untuk memahami semangat mencintai ekonomi kerakyatan. Hubungan kita dengan perusahaan transnasional harus dipatahkan dengan cepat, yakni pada struktur-struktur ekonomi yang terus melanggengkan dominasi pemilik modal. Perusahaan transnasional telah menjadi monster, raksasa global yang memegang kekuasaan ekonomi-politik yang sangat besar. Melainkan juga, janganlah negara Indonesia selalu mengantungkan kebijakan terhadap negara asing. Indonesia harus mampu mengambil kebijakan tanpa ada intervensi negara-negara Eropa.

Keempat, dalam upaya memutus mata rantai postkolonial, para birokrat dan masyarakat Indonesia, meminjam analisis Djoko Suryo, bangsa Indonesia ini juga perlu belajar dari sejarah (*history*) masa lalu untuk mengatasi persoalan kebangsaan pada masa kini dan untuk menatap masa depan yang lebih baik (Djoko Suryo, 2009:5). Belajar sejarah sangat menentukan sekali dalam memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi saat ini dengan tujuan untuk mencapai kemajuan di masa depan.

Ucapan Penghargaan

Dalam penelitian ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait terutama kepada dosen-dosen peneliti saat menempuh S2 di Fakultas Filsafat UGM. Kepada Prof.

Djoko Suryo yang telah mengajarkan tentang Sejarah Nasional Kebudayaan Indonesia dan Kepada Dr. Baskara T Wardaya selaku dosen mata kuliah Filsafat Sejarah yang selalu memberikan pencerahan sehingga penelitian dapat terselesaikan.

Konflik Kepentingan

Dari hasil penelitian ini peneliti mendeklarasikan bahwa dalam penelitian yang telah peneliti lakukan bebas dari konflik kepentingan pihak-pihak yang mungkin mengklaim hasil penelitiannya.

Referensi

- Anderson, Benedict, (2001), *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*, Terjemahan dari *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, Second edition, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Baso, Ahmad, (2005), *Islam Pasca Kolonial : Perselingkuhan Agama, Kolonialisme dan Liberalisme*, Mizan : Bandung.
- Gandhi, Leela, (1998), *Postcolonial Theory: A Critical Introduction*, Columbia University Press.
- King, Richard, (2001), *Agama, Orientalisme dan Postkolonialisme*, Qalam ; Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T dan Julianto, (1991), *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Airlangga: Surabaya.
- Lomba, Ania, (2005), *Colonialism/Postcolonialism*, London & New York : Routledge.
- Mudji Sutrisno, (2005), *Sejarah Filsafat Nusantara, Alam Pikiran Indonesia*, Galang Press : Yogyakarta.
- Roose Pole, (1999), *Nation and Identity*, London and New York.
- Suryo, Djoko, (2009), *Transformasi Masyarakat Indonesia Dalam Historiografi Indonesia Modern*, STPN Press: Yogyakarta.
- Sartono Kartodirdjo, (2001), *Indonesian Historiography*, Kanisius : Yogyakarta.
- Samuel Huntington, (2005), *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, terj. M Sadat Ismail, Qalam: Yogyakarta
- Kirom, Syahrul, 19 Mei (2007), *Kebangkitan atau Kebangkrutan Nasional*, Di Muat Dalam Koran Surya, Surabaya.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).